



BAB I

Pendahuluan

I.I. Informasi Umum

Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perda dibuat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.

Visi

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan landasan dalam penyusunan visi Biro Humas. Berdasarkan Visi Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat yang Mandani, Adil, Sejahtera dan Bermartabat, “maka selanjutnya dirumuskan visi Biro Humas sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Informatif dan partisipatif Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintah Yang Baik, Bersih dan Profesional”

Masyarakat informatif adalah suatu kehidupan masyarakat yang serba modern tidak akan lepas dari peran media dan informasi, salah satu peran media bagi manusia adalah untuk menjalin relasi atau koneksi dengan orang lain dalam konteks inilah media dan informasi menjadi penting agar komunikasi berjalan dengan baik.

Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau secara materil terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

Reformasi Birokrasi : adalah melakukan perubahan dan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada kegiatan komunikasi dan informasi, kegiatan reformasi birokrasi bidang komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan profesional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar nrgara republik indonesia tahun 1945.

Misi

Dalam Mewujudkan visi tersebut Biro Humas menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang komunikasi dan informasi menuju Pemerintah yang baik, bersih dan profesional.

Misi I : Untuk mewujudkan masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan adalah mendorong pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang amat penting dalam upaya memajukan pelaksanaan pembangunan di daerah secara baik dan merata dengan stabilitas informasi daerah yang baik, dapat menciptakan kondisi aman, nyaman, tentram dan damai ditengah-tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat dengan cerdas tidak mudah terpancing isu-isu yang menyesatkan dari berbagai pemberitaan media massa.

Misi II : Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang komunikasi dan informasi menuju pemerintah yang baik, bersih dan profesional untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan masyarakat serta semangat memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini juga berkaitan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabilitas dan profesional kepada masyarakat.

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri



kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

I.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.



I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dibidang Penyebarluasan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pembangunan menyiapkan bahan dan pengembangan hubungan masyarakat dalam rangka pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan media massa, data informasi, analisa dan hubungan antar lembaga.

Tujuan dibidang Kehumasan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya stabilitas informasi pada pemberitaan media massa.
2. Terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2016 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran sbb :

- a. "Terwujudnya stabilitas informasi pada pemberitaan media massa dan media elektronik".
- b. "Terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan daerah".
- c. "Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah".
- d. "Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah".

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2016 pada Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 9 (Sembilan) Program sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.



6. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
7. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
9. Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggungjawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut

No	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET KINERJA
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	402 buah materai Rp. 3.000 dan 350 buah materai Rp. 6.000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kebutuhan Bandwith Internet, Telepon dan Radio Link SIPKD selama 12 bulan
		3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	Terpeliharanya 3 unit kendaraan dinas operasional



				melalui Premi Asuransi
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya kebutuhan alat tulis perkantoran selama 12 bulan
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan perkantoran dan penggandaan/penjilidnan selama 12 bulan.
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabat Pusat 11 buah, Koran Daerah 35 buah dan majalah 3 buah selama 12 bulan.
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhiya kebutuhan makan & minum rapat selama 12 bulan.
		8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah selama 12 bulan
		9	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	- Tersedianya kebutuhan cetak foto dokumentasi kegiatan Pemprov. Sumbar selama 12 bulan.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Meubeleur	- Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran 1 buah Lemari Arsip Pejabat
		2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran 1 buah Komputer/PC
		3	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	- Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran 2 buah Kamera digital, 1 buah Kamera Video dan 1 Blizt
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	- Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi selama 12 bulan.
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya 4 unit kendaraan dinas operasional



				selama 12 bulan.
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	- Terpeliharanya 4 unit mesin Tik dan 6 buah AC selama 12 bulan.
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	- Terpeliharanya 6 unit komputer/PC, 4 unit Notebook/Laptop dan 1 unit service printer selama 12 bulan.
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terpeliharanya infrastruktur jaringan LAN/Internet Pemprov. Sumbar selama 12 bulan.
		9	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	- Terpenuhiya kegiatan pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terikutinya 4 kali Bimtekluar dan dalam daerah.
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terpenuhiya penyusunan laporan LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan fisik/keuangan setiap bulan dan Laporan Keuangan tahunan.
		2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	- Terpenuhiya perencanaan kegiatan SKPD RKA, DPA/DPPA Pergeseran, Restra dan Renja
		3	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpenuhiya kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD Honorarium KPA, Bendahara, PPTK, operator SIPKD selama 12 bulan.
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Bimtek Pelayanan Informasi Publik	- Terlaksananya 2 kali Bimtek Peraturan UU KIP dan 1 kali Sosialisasi
6.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	- Update DIP 2 kali, jumlah sengketa kurang dari 20 dan Sistem Informasi PPID
		2	Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kabupaten dan Kota	- 2 kali Rakor PPID dan SOP Kabupaten dan Kota



		3	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	-	Terlaksananya Pembinaan berupa Sosialisasi 1 kali
		4	Pengkajian Analisa Pemberitaan	-	Tersedianya 32 buku Analisis, 72 buku kliping Koran dan 1 kali Bimtek
		5	Koordinasi Kehumasan	-	Terselenggaranya 2 kali Rakor Bakohumas dan 200 buah Buletin
		6	Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	-	Terselenggaranya 1 kali Bimtek
7.	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Liputan Pemerintah Daerah	-	1.092 Liputan kegiatan Pemprov dan 36 Pengumpulan/penhimpunan data informasi
		2	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak	-	Tersebaranya informasi kegiatan Pemprov berupa Publikasi melalui media cetak 125 kali
		3	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik	-	38 kali siaran langsung, 36 kali penayangan dialog dan 10 kali siaran tunda.
		4	Penyebaran Informasi Laopran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (ILPPD)	-	Penyebaran informasi kegiatan pemprov sumbar melalui media cetak 12 kali
		5	Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	-	100 buku Visualisasi Pembangunan
		6	Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah	-	4 paket film potensi daerah, 12 CD kegiatan dan 400 pengandaan film dokumenter.
		7	Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media luar Ruang	-	14 Baliho, 20 stand Banner/roling Up, 800 paket cetak foto dinas Gub/wakil Gub
8.	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar	-	3300 data dan informasi dan 60 orang operator Website
		2	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	-	Persentase rampungnya Gedung Inforkom
9.	Program Pengelolaan e-Government Pemerintah	1	Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government	-	Identifikasi tentang Implementasi e-



Daerah	Kabupaten dan Kota	Government pada 19Kab/Kota
	2 Implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	- Data dan Informasi 50 orang, 1000 orang, 25 SKPD, 5 unit, 2 unit dan 10 unit.
	3 Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP).	- Implementasi M-CAP di 40 Nagari pada 12 Kabupaten di Sumatera Barat

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2016, Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat mengalokasi belanja sebesar Rp. 9.940.624.000,- realisasi sebesar Rp. 8.082.971.204,- jumlah tersebut mencapai 81,31 % dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.053.589.254,-
-	Belanja Modal	Rp.	2.029.381.950,-
	Jumlah	Rp.	8.082.971.204,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.082.971.204,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 81,31%.

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Biro Humasmempunyai anggaran sebesarRp. 6.443.311.500,- telah direalisasikan sebesar Rp. 6.053.589.254,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 93,95%

Untuk Belanja Modal, Biro Humasmempunyai anggaran sebesar Rp. 3.497.312.500,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.029.381.950,- atau dalam bentuk persentase sebanyak58,03 %

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :



No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	9.940.624.000,-	8.082.971.202,-	81,31	Delapan puluh satu koma tiga puluh satu persen
I	BELANJA OPERASI	6.443.311.500,-	6.053.589.254,-	93,95	Sembilan puluh tiga koma sembilanpuluh lima persen
I	Belanja Barang dan Jasa	6.443.311.500,-	6.053.589.254,-	93,95,-	Sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima persen
II	BELANJA MODAL	3.497.312.500,-	2.029.381.950,-	58,03	Lima puluh delapan koma tiga persen
I	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	1.432.102.500,-	157.550.000,-	11,00	Sebelas Persen
3	Belanja Gedung & Bangunan	2.065.210.000,-	1.871.831.950,-	90,64	Sembilan Puluh koma enam puluh empat Persen
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA/DPPABiro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 9 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.563.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.526.050.119 dalam bentuk persentase sebanyak 97,58% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.960.000,- realisasinya sebesar Rp. 9.956.000,- dengan persentase 99,96%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp.927.700.000,- realisasinya sebesar Rp. 892.474.589,- dengan persentase 96,20%

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- realisasinya sebesar Rp.16.007.000,- dengan persentase 94,16 %

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 12,460.000,- realisasinya sebesar Rp. 12,12.442.600,- dengan persentase 99,86%

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.350.000,- realisasinya sebesar Rp. 41.245.000,- dengan persentase 99,95.%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Surat Kabar mempunyai anggaran sebesar Rp. 298.000.000,- realisasinya sebesar Rp 297,948.000,- dengan persentase 99,98%,

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 5.990.000,- dengan persentase 99,83% .

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar Daerah

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- realisasinya sebesar Rp.196.736.930,- dengan persentase 99,47%

i. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 53.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 53,250.000,- dengan persentase 99,53%

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 291.108.000,- terealisasi sebesar Rp. 262.532.500,- dalam bentuk persentase sebanyak 90,18% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Meubeler

Untuk Pengadaan Meubeler mempunyai anggaran sebesar Rp. 15.100.000,- realisasinya sebesar Rp.3.600.000,- dengan persentase 23,84% direalisasikan sesuai kebutuhan.

b. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasikan sebesar Rp. 10.650.000,- dengan persentase 42,62 % direalisasikan sesuai kebutuhan

c. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Untuk Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 59.500.000,- realisasikan sebesar Rp. 59.300.000,- dengan persentase 99,66% direalisasikan sesuai kebutuhan

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.470.000,- dengan persentase 99,14% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 77.098.000,- realisasinya sebesar Rp. 75.497.500,- dengan persentase 97,92%

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.900.000,- dengan persentase 100%

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- realisasinya sebesar Rp. 6.590.000,- dengan persentase 99,85% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan.

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan mempunyai anggaran sebesar Rp. 78.350.000,- realisasinya sebesar Rp. 77.500.000,- dengan persentase 98,92% yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan.

i Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Untuk Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 23.060.000,- realisasinya sebesar Rp. 23.025.000,- dengan persentase 99,85%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 97.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.584.000,- dalam bentuk persentase sebesar Rp. 26,27 %.

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 97.400.000,- realisasinya sebesar Rp. 25.584.000,- dengan persentase 26,27% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 71.816.000,- ini merupakan adanya kesalahan penganggaran antar SKPD dalam hal peserta Bimtek.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.92.625.000 terealisasi sebesar Rp.92.508.000,- dalam bentuk persentase sebanyak 99,87% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.610.000 realisasinya sebesar Rp. 5.569.000,- dengan persentase 99,27%.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 7.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.750.000,- dengan persentase 99,36%.

c. Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 79.215.000,- realisasinya sebesar Rp. 79.189.000,- dengan persentase 99,97% .

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Untuk program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 68.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.717.150,- dalam bentuk persentase 57,98% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Bimtek Pelayanan Informasi Publik

Untuk kegiatan Bimtek Pelayanan Informasi Publik mempunyai anggaran sebesar Rp.68.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 39.717.150,- dengan persentase 57,98%.

6. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 6 (enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 848.895.000 terealisasi sebesar Rp. 682.316.740,- dalam bentuk persentase 80,38% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik mempunyai anggaran sebesar Rp.190.873.000,- realisasinya sebesar Rp. 101.476.225,- dengan persentase 53,16%. Dengan sisa sebesar Rp. 28.782.850 sisa tersebut merupakan belanja transportasi, sewa gedung, makan dan minum kegiatan, seminar kit dan narasumber

b. Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID

Untuk Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Kab dan Kota mempunyai anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 63.203.813,- dengan persentase 86,58% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.796.187,- sisa tersebut merupakan belanja transportasi narasumber, sewa gedung dan belanja narasumber.

c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat KIM

Untuk Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 45.871.000,- realisasinya sebesar Rp. 55.398.375,- dengan persentase 95,98%.

d. Pengkajian Analisis Pemberitaan

Untuk Kegiatan Pengkajian Analisis Pemberitaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 122.701.000,- realisasinya sebesar Rp. 103.831.211,- dengan persentase 84,62 % dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 18.869.789,- sisa tersebut merupakan belanjajewa gedung dan perjalanan dinas untuk pendukung kegiatan.

e. Koordinasi Kehumasan

Untuk Kegiatan Koordinasi Kehumasan mempunyai anggaran sebesar Rp. 270.382.000,- realisasinya sebesar Rp. 264.410.900,- dengan persentase 97,79 %.

f. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional

Untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisionalmempunyai anggaran sebesar Rp.146.068.000,- realisasinya sebesar Rp. 114.621.305,- dengan persentase 78,47% dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 31.446.695,- sisa tersebut merupakan sisa dari belanja pendukung kegiatan.

7. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah mempunyai 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.323.967.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.240.399.625,- persentase sebesar 96,40% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah

Untuk Kegiatan Liputan Pemerintah Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- realisasinya sebesar Rp.740.661.550,- dengan persentase 98,85 %

b. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak

Untuk Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media cetak mempunyai anggaran sebesar Rp. 748.339.000,- realisasinya sebesar Rp. 739.698.500,- dengan persentase 98,85%

c. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik

Untuk Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik mempunyai anggaran sebesar Rp.360.851.000,- realisasinya sebesar Rp. 304.739.125,- dengan persentase 84,45 %

d. Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)

Untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.961.400,- realisasinya sebesar Rp. 70.488.500,- dengan persentase 99,33%

e. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan

Untuk Kegiatan Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 86.336.000,- realisasinya sebesar Rp. 82.550.700,- dengan persentase 95,62%.

f. Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah

Untuk Kegiatan Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 33.741.000,- dengan persentase 96,40 %

g. Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang

Untuk Kegiatan Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 272.480.000,- realisasinya sebesar Rp. 268.520.250,- dengan persentase 98,55 %

8. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Untuk program Pengembangan Komunikasi dan Informatika mempunyai 2(dua) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.191.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.989.119.550,- dalam bentuk persentase 90,79% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Website Pemprov Sumatera Barat

Untuk Kegiatan Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar mempunyai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 291.497.600,- dengan persentase 97,17

b. Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom

Untuk Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.891.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.697.621.950,- dengan persentase 89,77% dengan sisa sebesar Rp. 193.378.050,- sisa ini merupakan dari pembangunan gedung.

9. Program Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah

Untuk program Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah mempunyai 3(tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.463.159.000 terealisasi sebesar Rp. 1.224.743.520,- dalam bentuk persentase sebesar 49,72% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Kota

Untuk Kegiatan Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Kota mempunyai anggaran sebesar Rp. 62.873.000,- realisasinya sebesar Rp. 58.763.115,- dengan persentase 93,46%

b. Implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Sumbar

Untuk Kegiatan Implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Sumbar mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.330.434.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.097.366.280,- dengan persentase 47,09 %

c. Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)

Untuk Kegiatan Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP) mempunyai anggaran sebesar Rp. 69.852.016,- realisasinya sebesar Rp. 68.614.125,- dengan persentase 98,23.%

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya ada beberapa kegiatan yang tingkat capaianrealisasi keuangannya dibawah 90 % di antaranya :

1. **Kegiatan Pengadaan Meubeleur :**

Untuk kegiatan Pengadaan Meubeleur persentase capaian keuangan 23,84% hal ini disebabkan adanya kesalahan perencanaan, sehingga tidak terealisasinya beberapa unit barang.

2. **Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk kegiatan ini tingkat persentase capaian keuangan 42, 60 % hal ini disebabkan adanya kesalahan perencanaan, sehingga tidak terealisasinya beberapa unit barang.

3. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan ini tingkat persentase capaian keuangan 26,27% hal ini disebabkan pada anggaran perubahan di alokasikan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 untuk kegiatan Bimtek Pencegahan Korupsi dengan peserta 6 orang yang diselenggarakan oleh BPK, ternyata untuk lebih efektif dan efisien peserta hanya dibolehkan 1 orang.

4. **Bimtek Pelayanan Informasi Publik**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 57,98 % hal ini disebabkan semula direncanakan 2 kali Bimbingan Teknis setelah hasil pemeriksaan inspektorat Biro humas tidak boleh melaksanakan kegiatan Bimtek.

5. **Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 53,16 % hal ini disebabkan tidak mendapat persetujuan untuk belanja perjalanan dinas luar provinsi oleh Sekretaris Daerah.

6. **Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Kota**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 86,58 % hal ini disebabkan belanja transportasi, sewa gedung, makanan & minuman kegiatan dan honorarium narasumber tidak sesuai dengan volume kegiatan.

7. **Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat KIM**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 75,81 % hal ini disebabkan belanja transportasi dan belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai dengan volume kegiatan

8. **Pengkajian Analisa Pemberitaan**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 84,62 % hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai dengan volume perencanaan kegiatan.

9. **Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 78,47 % hal ini disebabkan belanja jasa pengujian grup media tradisional kab/kota tidak terealisasi karena proses seleksi dilaksanakan Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi dan belanja perjalanan dinas luar daerah tidak dapat direalisasikan sesuai volume dengan alasan efisiensi.

10. **Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektronik**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 84,45 % hal ini disebabkan belanja publikasi (kegiatan dialog interaktif) tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan.

11. **Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 89,77 % hal ini disebabkan sisa belanja modal pembangunan gedung inforkom, sedangkan untuk pembangunan fisik mencapai 100 %

12. **Implementasi e-Government Pemprov. Sumbar**

Untuk kegiatan ini tingkat capaian keuangan 47,09 % hal ini disebabkan pengadaan peralatan jaringan fiber optik tidak mendapat izin/rekomendasi dari Pemko Kota Padang, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis*

akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis AkruaI untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

- 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan..
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Barang dan Jasa	6.443.311.500	6.050.014.254		5.813.639.641

a. Belanja Barang & Jasa

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 93,95.% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp.239.949.613 (3,96 %) Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	2015
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	303,095,850	280,174,560	92.44	370.193.970
-	Belanja Alat Tulis Kantor	99,058,250	97,502,700	98.43	102.381.550
-	Belanja alat listrik dan alat elektronik	0	0	0	10.700.000
-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,306,000	3,306,000	100.00	3.306.000
-	Belanja Bahan Bakar Minyak/mobilitas/pertamax	128,453,300	111,386,460	86.71	123.405.620
-	Belanja Seminar Kit Peserta	14,575,000	12,055,000	82.71	38.555.000
-	Belanja Peralatan/perengkapan kantor/pakai Habis	57,703,300	55,924,400	96.92	34.760.000
2	Belanja Jasa Kantor	2,526,420,000	2,526,420,000	96.31	2.387.230.402
-	Belanja Telepon	3,600,000	1,477,589	41.04	1.468.393
-	Belanja Surat Kabar / Majalah	298,000,000	297,948,000	99.98	297.117.000



-	Belanja Kawat/Faxcimile/Internet	924,100,000	890,997,000	96.42	882.064.109
-	Belanja Jasa Publikasi	1,075,700,000	1,051,200,000	97.72	1.164.720.000
-	Belanja Jasa Akomodasi	6,400,000	2,074,025	32.41	6.537.000
-	Belanja Transportasi	218,620,000	189,478,800	86.67	35.323.900
3	Belanja Premi Asuransi	17,000,000	16,007,000	94.16	14.170.900
-	Belanja Jasa Asuransi Barang Milik Daerah	17,000,000	16,007,000	94.16	14.170.900
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77,098,000	75,497,500	97.92	83.325.400
-	Belanja Jasa Service	19,200,000	19,200,000	100.00	16.800.000
-	Belanja Penggantian Suku Cadang	46,000,000	44,556,000	96.86	54.183.599
-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas	7,875,000	7,875,000	100.00	8.250.000
-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4,023,000	3,866,500	96.11	4.091.500
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	326,568,900	302,205,250	92.54	273.052.800
-	Belanja Cetak	210,660,500	192,238,500	91.26	240.884.900
-	Belanja Penggandaan	115,908,400	109,966,750	94.87	85.075.500
6	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat	10,000,000	600,000	6.00	7.800.000
-	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat	10,000,000	600,000	6.00	7.800.000
7	Belanja Makanan dan Minuman	97,231,750	73,061,500	75.14	194.566.250
-	Belanja Makan dan Minum Rapat	32,470,000	18,805,000	57.91	79.090.000
-	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	64,761,750	54,256,500	83.78	115.476.250
8	Belanja Perjalanan dinas	1,332,647,000	1,189,833,030	89.28	1.190.287.620
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	842,296,000	813,515,000	96.58	765.720.000



-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	490,351,000	376,318,030	76.74	424.567.620
9	Belanja Pemeliharaan	91,350,000	90,460,000	99.03	53.980.000
-	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	13,000,000	12,960,000	99.69	13.450.000
-	Belanja Pemeliharaan Sistem dan Jaringan komputer	78,350,000	77,500,000	98.92	28.350.000
-	Belanja Pemeliharaan aset tetap lainnya	0	0	0	12.180.000
10	Belanja Jasa Lembaga	199,000,000	196,750,000	98.87	0
-	Belanja Jasa Lembaga Kajian	199,000,000	196,750,000	98.87	0
11	Belanja Jasa Lainnya	888,000,000	888,000,000	100.00	0
	Belanja jasa pendampingan sistem informasi	888,000,000	888,000,000	100.00	0
12	Honorarium PNS	366,700,000	345,600,000	94.25	271.200.000
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	26,300,000	13,700,000	52.09	0
-	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42,000,000	42,000,000	100.00	41.400.000
-	Honorarium Pengelolaan Aset Daerah	15,300,000	15,300,000	100.00	12.900.000
-	Honorarium operator Pengelola SIPKD	24,000,000	24,000,000	100.00	21.000.000
-	Honorarium operator pengelola situs/website/portal pemprov. Sumbar	247,500,000	239,000,000	96.57	195.900.000
-	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	9,600,000	9,600,000	100.00	0
-	Honorarium Pengelola SIMBNAGDA	2,000,000	2,000,000	100.00	0
13	Honorarium Non PNS	208,200,000	158,650,000	76.20	358.025.000
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	154,700,000	111,100,000	71.82	145.500.000
-	Belanja Jasa Moderator	11,500,000	8,500,000	73.91	15.000.000
-	Belanja jasa Penguji	2,100,000	0	0.00	0

-	Belanja jasa MC/pembawa Acara	2,400,000	1,700,000	70.83	1.500.000
-	Belanja jasa pembaca Do'a	750,000	600,000	80.00	1.050.000
-	Belanja Verifikasi	36,750,000	36,750,000	100.00	0
-	Belanja Jasa Peliputan	0	0	0.00	190.975.000
-	Belanja Penulis Buletin	0	0	0.00	4.000.000

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 393.297.246 adalah terdiri dari :

1.	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 22.921.290
2.	Belanja Jasa Kantor	Rp. 93.244.586
3.	Belanja Premi Asuransi	Rp. 993.000
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 1.600.000
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 24.363.650
6.	Belanja Sewa Gedung/kantor	Rp. 9.400.000
7.	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 24.170.250
8.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.142.813.970
9.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 890.000
10.	Belanja Jasa Lembaga	Rp. 2.250.000
11.	Belanja Jasa Lainnya	Rp. 0
12.	Belanja Honorarium PNS	Rp. 21.100.000
13.	Belanja Honorarium non PNS	<u>Rp. 49.550.000</u>
	Jumlah.....	Rp.393.297.246

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 3.575.000 yaitu belanja makanan dan minuman kegiatan Implementasi e-Government Pemprov. Sumbar Rek. 1.25.1.20.03.02.29.02 – 5.2.211.04

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal	3.497.312.5000	2.029.381.950	58,03	2.555.057.522

Belanja Modal

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 58,03 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp 525.675.572 (25,90 %) Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.



No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.432.102.500	157.550.000	11,00	2.482.057.522

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesintahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 11,00 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 2.324.507.522 (75,96 %)

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.432.102.500	157.550.000	11,00	2.482.057.522
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28,000,000	0	0.00	0
-	Belanja Modal Pengadaan peralatan mini komputer	85,000,000	84,000,000	98.82	192.000.000
-	Belanja Modal Pengadaan komputer Unit/Jaringan	23,500,000	9,400,000	40.00	197.900.000
-	Belanja Modal Pengadaan printer/Ploter	1,500,000	1,250,000	83.33	3.390.000
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1,219,502,500	0	0.00	1304.899.522
-	Belanja Modal Pengadaan Meubeleur/Lemari Arsip	15,100,000	3,600,000	23.84	9.900.000
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	55,500,000	55,300,000	99.64	0
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimile	4,000,000	4,000,000	100.00	0
-	Pengadaan Perangkat Lunak/Sofwer	0	0	0	261.620.000
-	Pengadaan Kursi Kerja/Tamu	0	0	0	17.900.000
-	Pengadaan alat Kantor Lainnya	0	0	0	180.000.000
-	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0	0	0	28.008.000
-	Pengadaan Peralatan alat Komunikasi Telepon	0	0	0	286.440.000



Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **1.274.552.500** (89,00 %) terdiri dari :

1. BM Pengadaan peralatan jaringan sebesar Karena tidak mendapat izin/rekomendasi dari Pemko Kota Padang untuk pemasangan tiang Fiber Optik jaringan LAN.	Rp.1.219.502.500
2. BM Pengadaan alat rumah tangga sebesar Karena salah rekening belanja, sehingga tidak dapat direalisasikan	Rp. 28.000.000
3. BM Pengadaan Peralatan mini Komputer Sisa realisasi	Rp. 1.000.000
4. BM. Pengadaan Komputer Unit/Jaringan Sisa realisasi	Rp. 14.100.000
5. BM. Pengadaan Printer/Plotter	Rp. 250.000
6. Sisa realisasi	
7. BM. Pengadaan Meubeleur/Lemari Arsip Sisa realisasi	Rp. 11.500.000
8. BM. Pengadaan Peralatan Studio Visual Sisa realisasi	Rp. 200.000
Jumlah.....	Rp.1.274.552.500

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.065.250.000	1.871.831.950	90,64	73.000.000

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 90,64 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 690.000,42 %

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.065.210.000	1.871.831.950	90,64	73.000.000
-	Pengadaan Pembuatan konstruksi Baliho	174.210.000	174.210.000	100,00	0
-	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Inforkom	1.891.000.000	1.697.621.950	89,77	73.000.000

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 193.378.050 (09,36 %) terdiri dari :

- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Inforkom sebesar Rp. 193.378.050

Sisa tersebut merupakan sisa dari kontrak pengadaan pembangunan gedung tersebut.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 163.964.635, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016	0	4.255.762.839,00	4.255.762.839,00	0

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.a

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2. Beban Dibayar Dimuka | 10.488.000 | 10.177.641,67 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa : Premi Asuransi kendaraan dinas yang menjadi beban tahun ini dan beban tahun depan dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Beban bayar dimuka tahun ini Januari Juni 2016 (2 unit x 6 bl)	= Rp. 4.894.324,98
Beban bayar dimuka tahun ini Januari Juni 2016 (1 unit x 6 bl)	= Rp. 2.191.125,-
Jumlah.....	= Rp. 7.085.449,98

Beban bayar dimuka tahun ini Juli – Agustus 2016 (2 unit x 2 bl)	= Rp. 1.631.441,66
Beban bayar dimuka tahun ini Juli – September 2016 (1 unit x 4 bl)	= Rp. 1.460.750,00
Jumlah.....	= Rp. 3.092.192,00
Total.....	= Rp. 10.177.641,64

Beban bayar dimuka tahun depan 2017 (2 unit x 8 bl)	= Rp. 6.404.667
Beban bayar dimuka tahun depan 2017 (1 unit x 10 bl)	= Rp. 4.083.333
Jumlah.....	= Rp. 10.488.000

Berikut tabel Beban bayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	10.177.641,64	7.085.449,98	3.092.191,96	10.488.000,00



Penambahan adalah : merupakan beban jasa dibayar dimuka untuk premi asuransi kendaraan dinas periode bulan Januari – Juni 2016 (semester I) sebesar Rp. 7.085.449,98

Sedangkan Pengurangan adalah : merupakan beban jasa dibayar dimuka premi asuransi kendaraan dinas untuk bulan Juli – Agustus – September dan Oktober sebesar Rp. 3.092.191,96

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2016	2015
3. Persediaan	2.927.250	2.066.000

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :
Berikut uraian sesuai kelompok persediaan seperti tabel di bawah ini :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Pakai Habis				
- Alat Tulis Kantor	1.935.000	774.000	41.750	1.936.750
- Peralatan/Perlengkapan pakai habis	131.000	129.000	0	990.500
Jumlah	2.066.000	903.000	41.750	2.927.250

Keterangan :

- Saldo awal adalah merupakan persediaan per 31 Desember 2015

Sebesar Rp. 2.066.000 = Rp. 2.066.000

- Penambahan persediaan pada semester I 2016

Sebesar Rp. 2.969.000 – 2.066.000 = Rp. 903.000

- Pengurangan persediaan pada per 31 Desember 2016

Sebesar Rp. 2.969.000 – 2.927.250 = Rp. 41.750

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
1. Peralatan dan Mesin	4.924.015.059,00	4.313.679.348,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Humas Setda Provinsi Sumbar per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 127.975.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 4.796.040.059,00
c. Apraisal 2011	Rp.
d. Apraisal 2012	Rp.
e. Apraisal 2013	Rp.
f. Apraisal 2015	Rp.



Daftar Peralatan dan Mesin Biro Humas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Humas Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	4.313.679.348,00	992.915.711,00	382.580.000,00	4.924.015.059,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Nilai Buku		0	0	0

Saldo Audited 2015 **4.313.679.348,00**

Mutasi Tambah 992.915.711,00
Belanja Modal tahun 2016 331.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 0
Koreksi Tambah Nilai 0
Kurang catat/tidak tercatat 11.305.000,00
Hibah dari Pihak Ketiga 649.850.711,00
Mutasi antar SKPD 0
Reklasifikasi 0
Total Mutasi Tambah **992.915.711,00**

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
Koreksi Kurang Nilai
Double Record/Aset Pusat
Hibah Kepada Pihak Ketiga
Penghapusan
Mutasi antar SKPD 382.580.000,00
Reklasifikasi
Total Mutasi Kurang **382.580.000,00**
Total Mutasi **382.580.000,00**
Saldo per 31 Des 2016 **4.924.015.059,00**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 992.915.711,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Kurang catat atau tidak tercatat senilai Rp. 11.305.000,00 berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Aset pada tanggal 9 Januari Tahun 2016 yaitu : Tower sesuai nilai kontrak.
- c) Hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp. 649.850.711. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Monile Community Access Point (M-CAP) Tahun 2007 Nomor. 34/KOMPINFO/DJAI.1/HK.03.02/10/2016 tgl 7 September 2016 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Media Center Tahun 2012 Nomor. 2458/DJIKP.1/KOMINFO/PL.04.01/11/2015 tgl 9 November 2015 terdiri dari : Mobile Community Access Point (M-CAP) Tahun 2017 senilai Rp. **467.653.491** dan Media Center Tahun 2012 senilai Rp. **182.197.220**.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 382.580.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 9 Januari 2016 yaitu : Smartpon dan Scanner untuk (simaya)

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

2. Gedung dan Bangunan	3.208.524.950,00	0
-------------------------------	-------------------------	----------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Humas per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp	3.208.524.950,00
c. Appraisal 2011	Rp.
d. Apraisal 2012	Rp.
e. Apraisal 2013	Rp.
f. Apraisal 2015	Rp.

Daftar Gedung dan Bangunan Biro Humas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Humas Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	0	3.382.734.950,00	174.210.000,00	3.208.524.950,00
Akm Peny Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Nilai Buku		3.382.734.950,00	174.210.000,00	3.208.524.950,00

Saldo Audited 2015	0
<u>Mutasi Tambah</u>	3.382.734.950,00
Belanja Modal tahun 2016	1.871.831.950,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2016	
Koreksi Tambah Nilai	
Kurang catat/tidak tercatat	
Hibah dari Pihak Ketiga	
Mutasi antar SKPD	
Reklasifikasi	1.510.903.000,00
Total Mutasi Tambah	-----
<u>Mutasi Kurang</u>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	
Koreksi Kurang Nilai	
Double Record/Aset Pusat	
Hibah Kepada Pihak Ketiga	
Penghapusan	
Mutasi antar SKPD	
Reklasifikasi	174.210.000,00
Total Mutasi Kurang
Total Mutasi
Saldo per 31 Des 2016	3.208.524.950,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.871.831.950,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Reklasifikasi senilai Rp 1,510.903.000,00 yaitu dari Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Gedung dan Bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi senilai Rp 174.210.000,- yaitu dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin karena merupakan Konstruksi Baliho yang sebenarnya terletak pada aset peralatan dan mesin sebanyak 3 buah.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

3. Aset Tetap Lainnya

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

1. Konstruksi dalam Pengerjaan	0	1.510.903.000,00
--------------------------------	---	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di SKPD Biro Humas per 31 Desember 2016 dan 2015.

Mutasi Tambah-Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kontruksi Dalam Pengerjaan KDP	1.510.903.000,00	0	1.510.903.000,00	0

Saldo Audited 2015	1.510.903.000,00
Mutasi Tambah	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi	1.510.903.000,00
Eliminasi	1.510.903.000,00
Total Mutasi Kurang	1.510.903.000,00
Total Mutasi	1.510.903.000,00
Saldo per 31 Des 2016	0

Penjelasan Mutasi Kurang

- 1) Reklasifikasi senilai Rp 1.510.903.000,00 yaitu : dari Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) merupakan gedung Inforkom yang pada tahun 2016 sudah selesai fisik pengerjaan, sehingga di mutasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan.

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

Perkiraan	2016	2015
4. Akumulasi Penyusutan	(2.872.163.712,50)	(2.081.215.372,96)
Terdiri dari :		
• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(2.807.993.213,50)	(2.081.215.372,96)
• Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan	(64.170.499,00)	0

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	2.081.215.372,96	809.123.840,54	82.346.000,00	2.807.993.213,50
Akm. Gedung dan Bangunan	0	0	64.170.499,00	64.170.499,00

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA)	2.081.215.372,96	0
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:		
o Kurang Catat/tdk tercatat	11.305.000,00	
o Hibah dr Pihak Ketiga	0	
o Mutasi antar SKPD		
o Reklasifikasi	0	
o Koreksi + Saldo Awal	6.050.000,00	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:		
o Double Record		
o Hibah		
o Penghapusan		
o Mutasi antar SKPD	81.488.000,00	
o Reklasifikasi		
o Koreksi - Saldo Awal	858.000,00	
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	791.768.840,54	64.170.499,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	2.807.993.213,50	64.170.499,00

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Kurang catat atau tidak tercatat senilai Rp. 11.305.000,00 berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi tang 9 Desember 31 2016 yaitu : Tower sesuai nilai kontrak.
- b) Koreksi tambah nilai senilai Rp. 6.050.000,00 yaitu dari Aset KIB. B karena kesalahan penempatan umur scanner dari 5 tahun 4 tahun koreksi sesuai aplikasi.
- c) Beban Penyusutan tahun 2016 senilai Rp. 791.768.840,54 yaitu Beban penyusutan Aset Peralatan dan Mesin.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- 1) Mutasi antar SKPD senilai Rp. 81.488.000,00 yaitu merupakan KIB. B Mutasi Smaya ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
- 2) Koreksi kurang nilai sebesar Rp. 858.000,00 yaitu koreksi penyusutan Smartpon pada Semester I Tahun 2016

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015
------------------	-------------	-------------

5. **Aset Tidak Berwujud** **424.520.000,00** **424.520.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 424.520.000,00 di nilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	424.520.000,00	0	233.008.000,00	191.512.000,00
Akm Amortisasi	156.064.000,00	76.944.000,00	0	233.008.000,00
Nilai Buku	268.456.000,00	76.944.000,00	0	191.512.000,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2016	2015
------------------	-------------	-------------

6. **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** **(233.008.000,00)** **(156.064.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015.. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	424.520.000,00	0	233.008.000,00	191.5512.000,00



Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015 (NERACA)	(156.064.000,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	
○ Kurang Catat/tak tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi + Saldo Awal	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016	76.944.000,00
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 16	(233.008.000,00)

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan:**Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Beban Penyusutan Tahun 2016 sebesar Rp. 76.944.000,00

KEWAJIBAN

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

7. Utang Belanja 57.946,00 183.283,00

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 57.946,00

Yaitu utang belanja telepon Biro Humas yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	183.283,00	57.946,00	183.283,00	57.946,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.



EKUITAS

	Perkiraan	2016	2015
--	-----------	------	------

8. Ekuitas		4.255.586.173,14	4.023.883.333,71
------------	--	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

• Ekuitas	4.255.586.173,14
• Surplus/Defisit LO	(6.981.600.648,18)
• Perubahan SAL	8.079.396.204,00
• Surplus/Defisit LRA	(8.082.971.204,00)
• RK/PPKD	8.082.971.204,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

	Perkiraan	2016	2015
--	-----------	------	------

a. Beban Barang & Jasa		6.050.014.254,00	5.813.639.641,00
-----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

NO.	URAIAN	2016	2015
	Beban barang dan Jasa	6.037.734.233,00	5.774.647.631,33
1.	Beban Bahan Pakai Habis	278.150.310,00	341.294.770,00
-	Beban Persediaan alat tulis kantor	95.478.450,00	101.575.550,00
-	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0	10.700.000,00
-	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	3.306.000,00	3.306.000,00
-	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	111.386.460,00	123.405.620,00



-	Beban Seminar Kit Peserta	12.055.000,00	38.555.000,00
-	Beban peralatan/perengkapan pakai habis	55.924.400,00	63.752.600,00
2	Beban Jasa Kantor	2.433.416.643,00	2.387.315.234,00
-	Beban Jasa telepon	1.718.818,00	1.553.225,00
-	Beban Jasa surat kabar/majalah	297.948.000,00	297.117.000,00
-	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	890.997.000,00	882.064.109,00
-	Beban Jasa Publikasi	1.051.200.000,00	1.164.720.000,00
-	Beban jasa akomodasi	2.074.025,00	6.537.000,00
-	Beban Transportasi	189.478.800,00	35.323.900,00
3	Beban Premi Asuransi	5.519.000,00	3.993.258,33
-	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.519.000,00	3.993.258,33
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	75.497.500,00	83.325.099,00
-	Beban Jasa Service	19.200.000,00	16.800.000,00
-	Beban Penggantian Suku Cadang	44.556.000,00	54.183.599,00
-	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.875.000,00	8.250.000,00
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.866.500,00	4.091.500,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan	302.205.250,00	325.960.400,00
-	Beban Cetak	192.238.500,00	240.884.900,00
-	Beban Penggandaan	109.966.750,00	85.075.500,00
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	7.800.000,00
-	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	7.800.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman	73.061.500,00	194.566.250,00
-	Beban makanan dan minuman rapat	18.805.000,00	79.090.000,00
-	Beban makanan dan minuman kegiatan	54.256.500,00	115.476.250,00
8	Beban Perjalanan Dinas	1.189.833.030,00	1.190.287.620,00
-	Beban perjalanan dinas dalam daerah	813.515.000,00	765.720.000,00
-	Beban perjalanan dinas luar daerah	376.318.030,00	424.567.620,00
9	Beban Pemeliharaan	90.460.000,00	53.980.000,00
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.960.000,00	13.450.000,00



-	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.500.000,00	12.180.000,00
-	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0	28.350.000,00
	Beban Jasa Konsultasi	0	510.400.000,00
-	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0	43.000.000,00
-	Beban jasa konsultansi teknologi informasi	0	467.400.000,00
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	Beban bimbingan teknis
-	Beban bimbingan teknis	0	39.000.000,00
	Beban Honorarium Non Pegawai	0	358.025.000,00
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO	0	145.500.000,00
-	Beban Jasa Moderator	0	15.000.000,00
-	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	0	1.500.000,00
-	Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	0	1.050.000,00
-	Beban Jasa Peliputan	0	190.975.000,00
	Beban Honorarium Penulisan Buletin	0	4.000.000,00
10	Honorarium PNS	345.600.000,00	271.200.000,00
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO	13.700.000,00	0
-	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	42.000.000,00	41.250.000,00
-	Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	15.300.000,00	13.050.000,00
-	Honorarium Pengelola SIPKD - LO	24.000.000,00	21.000.000,00
-	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	239.000.000,00	195.900.000,00
	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD-LO	9.600.000,00	0
-	Honorarium Pengelola SIMBANGDA-LO	2.000.000,00	0
11	Honorarium Non PNS	121.900.000,00	0
-	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO	111.100.000,00	0
-	Beban Jasa Moderator	8.500.000,00	0
-	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	1.700.000,00	0
-	Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	600.000,00	0
12	Beban Jasa Lembaga	196.750.000,00	0



-	Beban Jasa Lembaga Kajian	196.750.000,00	0
13	Beban Jasa Lainnya	888.000.000,00	0
-	Beban Jasa Pendampingan Sistem Informasi	888.000.000,00	0
14	Beban Vakasi/Verifikasi	36.750.000,00	7.500.000,00
-	Beban Verifikasi.	36.750.000,00	7.500.000,00
-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	791.768.840,54	726.560.468,96
-	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	64.170.499,000	0
-	Beban Amortisasi Aset tidak Berwujud	76.944.000,00	76.944.000,00
	Jumlah Beban	6.981.600.648,21	6.578.152.100,29

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 3.575.000,00 yang terdiri dari :

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO adalah sebagai berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Beban Bahan Pakai Habis	280.174.560,00	278,150,310.00	41.750,00
Beban Jasa Kantor	2.433.175.414.00	2,433,416,643.00	57.946,00
Beban Premi Asuransi	16.007.000.00	5,519,000.00	(10.488.000,00)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	75,497,500.00	75,497,500.00	0
Beban Cetak dan Penggandaan	302,205,250.00	302,205,250.00	0
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600,000.00	600,000.00	0
Beban Makanan dan Minuman	73.061.500,00	600,000.00	0
Beban Perjalanan Dinas	1,189,833,030.00	1,189,833,030.00	0
Beban Pemeliharaan	90,460,000.00	90,460,000.00	0
Honorarium PNS	345,600,000.00	345,600,000.00	0
Honorarium Non PNS	158.650.000,00	121,900,000.00	0
Beban Jasa Lembaga	196,750,000.00	196,750,000.00	0
Beban Jasa Lainnya	888,000,000.00	888,000,000.00	0
Beban Vakasi/Verifikasi	36,750,000.00	36,750,000.00	0
Belanja Modal	2.029.381.950,00	2.029.381.950,00	2.029.381.950
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	791.768.840,54	791.768.840,540
Beban Penyusutan Gedung dan Banguna	0	64.170.499,00	64.170.499,000
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	76.944.000,00	76.944.000,000



1. Beban Jasa Telepon Semester I	Rp.	(183.283,00)
2. Beban Persediaan ATK Semester I	Rp.	(903.000,00)
3. Beban Premi Asuransi Semester I	Rp.	<u>7.085.449,98</u>
Jumlah	Rp.	5.999.188,98
4. Beban Persediaan ATK Semester II	Rp.	41.750,00
4. Beban Jasa Telepon Semester II	Rp.	57.946,00
5. Beban Premi Asuransi Semester II	Rp.	3.092.191,66
6. Beban Premi Asuransi per 31 Des 2016	Rp.	(10.488.000,00)
7. Koreksi nilai Beban premi asuransi per 31 des 2015	Rp.	<u>(0,03)</u>
Jumlah	Rp.	(7.296.112,37)
Selisih :	Rp.	(1.296.945,39)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	Persediaan ATK	Beban Persediaan ATK	41.750,00
• Belanja Jasa Kantor	Jasa Telepon	Beban Jasa Telepon	57.946,00
• Belanja Premi Asuransi	Premi asuransi	Beban Premi asuransi	(10.488.000,00)
Jumlah			

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Persediaan ATK	903.000,00	0	0	41.750,00	903.000,00	41.750,00
Jumlah					903.000,00	41.750,00

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian telepon bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Utang Belanja Jasa (Telepon)	183.283,00	0	0	57.946,00	183.283,00	57.946,00
Jumlah					183.283,00	57.946,00

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.



LAPORAN KEUANGAN 2016 BASIS AKRUAL

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Premi Asuransi	7.085.449,98		3.092.191,67	10.488.000,00	10.177.641,65	10.488.000,00
Jumlah					10.177.641,65	10.488.000,00

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi 932.883.339,54 803.504.468,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 791.768.840,54
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 64.170.499,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 76.944.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Perkiraan	2016	2015
1. Ekuitas Awal		4.023.883.333,71
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (6.981.600.648,21) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016.		
3. RK PPKD sebesar Rp. 8.079.396.204,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.		
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 343.566.711,00 Terdiri dari :		
- Mutasi kurang peralatan dan mesin	Rp. (301.092.000,00)	
- Koreksi AKM. Penyusutan peralatan & mesin	Rp. (6.050.000,00)	
- Mutasi tambah Hibah kendaraan (mobil) Ke peralatan & mesin	Rp. 649.850.711,00	
- Koreksi kurang nilai AKM. Penyusutan	<u>Rp. 858.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp. 343.566.711,00	
5. Ekuitas Akhir	5.465.245.600,50	

1.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0	0	0
• Pendapatan Pajak	0	0	0
• Pendapatan Retribusi	0	0	0
• Lain-lain PAD Yg Sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0
Belanja Operasi	0	0	0
• Belanja Pegawai	0	0	0
• Belanja Brg & Jasa	6.050.014.254,00	6.048.717.308,64	(1.296.945,39)
• Belanja Modal	2.029.381.950,00	0	(2.029.381.950,00)
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0	932.883.339,54	(932.883.339,54)
• Beban Penyisihan Piutang	0	0	0
Jumlah Beban Operasi	8.079.396.204	6.981.600.648,18	(1.097.795.556)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai auxiliary staf memberikan dukungan pelayanan internal kepada instansi di jajaran Pemerintah Provinsi dan pelayanan langsung kepada masyarakat dan khususnya mitra kerja media cetak dan media elektronik dalam hal di bidang informasi, komunikasi dan penyebarluaran informasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomo 21 tahun 2010, pasal 88 ayat 1 tentang uraian tugas dan fungsi sebagai auxiliary staf Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaringan informasi
- b. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi di bidang kehumasan
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis hubungan fungsional dengan unit pelayanan informasi dan komunikasi dalam lingkup Pemprov. Sumbar.
- d. Pelaksanaan urusan Telematika dan Elektronik.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- I. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Penerangan terdiri dari :
 - 1). Subag Tata Usaha
 - 2). Subag Pemberitaan
 - 3). Subag Dokumentasi
3. Kepala Bagian Analisa kebijakan dan Media terdiri dari :
 - 1). Subag Media Massa
 - 2). Subag Analisa Kebijakan
 - 3). Subag Sosialisasi

4. Kepala Bagian Telematika terdiri dari :
- 1). Subag Sistem Informasi Manajemen
 - 2). Subag Sarana dan Prasarana Telematika
 - 3). Subag Pengembangan Sistem Informasi

Adapun jumlah PegawaiBiro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 berjumlah 48orangdengan susunan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel I.

Jumlah Pegawai per Bagian

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Bagian Penerangan	25 orang
2.	Bagian Analisa kebijakan Media Massa	12 orang
3.	Bagian Telematika	9 orang
	Jumlah	46orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 2.

Jumlah pegawaidasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	II	9 orang
2	III	34 orang
3	IV	4 orang
	Jumlah	47 orang

6.3 Aspek Strategis Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat _____

Pada aspek strategis Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada visi dan misi Pemerintah Pusat yaitu :

1. “Nawa Cita“ 9 (sembilan) program RPJMN 2015 – 2019
2. Peningkatan pelayanan publik (PPID) dan sistem pengolahan manajemen kehumasan.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi e –government
4. Menjaga stabilitas informasi dan meningkat daya saing dalam pasar bebas MEA 2016

BAB VII

Penutup

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2016 Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 9 (sembilan) Program dengan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan pencapaian target tidak ada kendala yang sangat berarti, dari target yang telah ditetapkan, 18,72% keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2016 pada Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat dapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.940.624.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 8.079.396.204,- (81,28%).
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0, Persediaan terdiri dari : belanja alat tulis kantor, barang pakai habis per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.927.250,- yang nantinya merupakan cadangan persediaan
- c. Untuk tahun 2016 Aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan

7.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perlunya penambahan Staf dibidang Akuntansi.













NO.	URAIAN	2016	2015
1.	Beban Bahan Pakai Habis	280.174.560,00	370.193.970,00
2	Beban Jasa Kantor	2,433,175.414,00	2.387.230.402,00
3	Beban Premi Asuransi	16.007.000,00	14.170.900,00
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	75,497,500.00	83.325.099,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan	302,205,250.00	325.960.400,00
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600,000.00	7.800.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman	73.061.500.00	194.566.250,00
8	Beban Perjalanan Dinas	1,189,833,030.00	1.190.287.620,00
9	Beban Pemeliharaan	90,460,000.00	53.980.000,00
10	Beban Jasa konsultasi	0	510.400.000,00
11	Beban Kursus, Pelatihan/Sosialisasi dan BIMtek	0	39.000.000,00
12	Honorarium Non Pegawai	0	358.025.000,00
13	Honorarium PNS	345,600,000.00	271.200.000,00
14	Honorarium Non PNS	158.650.000.00	0
15	Beban Jasa Lembaga	196,750,000.00	0
16	Beban Jasa Lainnya	888,000,000.00	0
17	Beban Vakasi/Verifikasi	36,750,000.00	7.500.000,00

6. **Ekuitas Awal** **4.023.883.333,71**
7. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (6.981.600.648,18) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016.
8. RK PPKD sebesar Rp. 8.082.971.204,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
9. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 231.702.839,45
10. **Surplus/Defisit LO** (6.981.600.648,18) (6.578.697.163,00)



11. RK PPKD	8.082.971.204,00	8.368.697.163,00
12. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0
13. Ekuitas Akhir	5.256.956.728,96	

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

2. Ekuitas Awal sebesar Rp.4.023.883.333,71 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2015.

3. Koreksi Ekuitas terdiri dari :

- Mutasi kurang Peralatan dan mesin	Rp. (301.092.000,00)
- Koreksi AKM.penyusutan peralatan & mesin	Rp. (6.05.000,00)
- Mutasi Tambah Hibah ke Peralatan & Mesin	Rp. 537,986,839,43
Koreksi kurang nilai AKM penyusutan	<u>Rp.</u>
<u>858.000,000</u>	
Jumlah.....	Rp. 231.702.839,45

4. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (6.981.600.648,18) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016

5. RK PPKD sebesar Rp. 8.082.971.204,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

6. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

7. Ekuitas Akhir sebesar Rp.5.356.956.728,96,00 adalah saldo Ekuitas Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.